

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM MERIT PADA PENEMPATAN PEGAWAI DI
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

GHANIYYA RAJWA ZAKIRAH

2110113018

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PKVIII)**



Pembimbing :

**Dr. azmi Fendri, S.H., M.Kn
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 14/PK-VII/III/2025

PENERAPAN SISTEM MERIT PADA PENEMPATAN PEGAWAI DI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

(Ghaniyya Rajwa Zakirah, 2110113018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2025)

ABSTRAK

Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian merupakan strategi penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit dalam penempatan pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen kebijakan dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip sistem merit telah diadopsi dalam regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian kompetensi dengan jabatan, intervensi non-profesional dalam proses rekrutmen, serta kurangnya mekanisme evaluasi kinerja yang komprehensif. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kurang optimalnya sistem ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan minimnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Studi ini merekomendasikan peningkatan mekanisme seleksi berbasis kompetensi, penguatan kebijakan evaluasi kinerja, serta optimalisasi sistem pengawasan dalam penerapan sistem merit guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di sektor kebudayaan. Penerapan sistem merit yang lebih baik diharapkan dapat memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kebudayaan.

Kata Kunci: Sistem Merit, Penempatan Pegawai, Manajemen Kepegawaian, Birokrasi, Dinas Kebudayaan.